

## BAB II

### TINDAKAN PENYADAPAN AUSTRALIA TERHADAP INDONESIA DAN PERKEMBANGAN ISU PADA TINGKAT PUBLIK

Pada bab ini membahas mengenai penyadapan yang dilakukan oleh Badan Intelijen milik Australia terhadap beberapa Pejabat Indonesia termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menjabat pada waktu itu. Hal tersebut diketahui akibat dibocorkannya dokumen rahasia milik NSA (*Natoinal Security Agency*) milik Amerika Serikat oleh mantan pegawai NSA yaitu Edward Joseph Snowden. Selanjutnya menjelaskan mengenai akibat dari aksi spionase tersebut yang berdampak bagi hubungan antar kedua negara tersebut serta membahas aksi spionase lintas negara menurut hukum Internasional.

#### 2.1 Kasus Penyadapan

Penyadapan atau intersepsi adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan atau mencatat transmisi informasi elektronik dan atau Dokumen elektronik yang bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti elektromagnetis atau Radio.<sup>1</sup> Pengertian penyadapan sendiri juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang secara sengaja melakukan tindakan sadapan.<sup>2</sup> Penyadapan juga memiliki beberapa istilah lain seperti *Wiretapping* ataupun

---

<sup>1</sup> Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

<sup>2</sup> Kristian S.H., 2013, *Sekelumit tentang Penyadapan dalam Hukum Positif di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, hal. 179

Intersepsi.<sup>3</sup> *Wiretapping* yaitu proses pengambilan informasi dari percakapan orang lain tanpa diketahui orang tersebut.<sup>4</sup> Penyadapan merupakan serangkaian kegiatan yang secara sengaja untuk kepentingan penyelidikan dan atau penyidikan yang dilakukan oleh badan tinggi Negara melalui telepon maupun alat elektronik lainnya.<sup>5</sup>

Penyadapan pada dasarnya hanya dibolehkan bagi petugas yang berwenang dalam suatu negara guna meningkatkan pengawasan tingkat tinggi dan dilakukan sepenuhnya untuk kepentingan keamanan negara agar mampu mempertahankan dan meningkatkan kemampuan melawan tindakan teror. Kewenangan penuh untuk menerapkan penyadapan yang sah secara hukum tersebut dikenal dengan istilah *lawful interception*.<sup>6</sup> Lembaga-lembaga di Indonesia yang mempunyai wewenang tersebut antara lain Kepolisian, Kejaksaan, BNN (Badan Narkotika Nasional) serta KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).<sup>7</sup> Dikhususkan untuk KPK yang tertuang pada Pasal 12 Undang-undang KPK yang berbunyi “Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 (a) Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan”<sup>8</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid.* Hal.180

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> WJS Purwodarminto, 2008, *Kamus Hukum*, Citra Umbara, Bandung. Hal. 346

<sup>6</sup> Firman Nuro, *Aspek Hukum Mengenai Monitoring Aktivitas Komputer dan Tindak Pidana Penyadapan Data Pribadi Pengguna Internet* Hal. 22

<sup>7</sup> Havizd Mukti, Aksi Penyadapan Dan Aturan Main Menurut UU diakses dalam <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20170201175140-185-190637/aksi-penyadapan-dan-aturan-main-menurut-uu/> pada 29 Agustus 2017 Pukul 17.10 WIB

<sup>8</sup> Pasal 12 (a) undang-undang republik indonesia nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi

Berikut adalah karakteristik atau ciri khusus dari *Cybercrime* yang sesuai dengan spionase:<sup>9</sup>

1. *Unauthorized acces* atau akses tidak sah
2. *Nonviolance* (tanpa kekerasan)
3. *Minimize of Physical Contact* (Sedikit melibatkan kontak fisik)
4. *Equipment* (Menggunakan peralatan), teknologi, dan memanfaatkan jaringan telematika (telekomunikasi, media dan informatika) global
5. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian material maupun immaterial (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional.

Di Australia organisasi-organisasi milik negara Australia yang mempunyai wewenang untuk penyadapan antara lain ASIO (*Australian Security Intelligence Organization*)<sup>10</sup> ASIS (*Australian Secret Intelligence Service*)<sup>11</sup> dan ASD (*Australian Signal Directorate*)<sup>12</sup>. Dibawah hukum Australia, ketiga badan intelijen tersebut memiliki kewenangan cukup besar untuk mengumpulkan data. Kebanyakan pembatasan kegiatan mereka untuk melindungi privasi warga negara

---

<sup>9</sup> Rofi'a Zulkarnain, Herman Suryokumoro S.H.,MS, Dr. Patricia Audrey Ruslijanto S.H.,MKn *Tindakan Spionase Melalui Penyadapan Antar Negara Sebagai Cybercrime* No.10, 2008, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

<sup>10</sup> Australian Government, *Australian Security Intelligence Organization* diakses dalam <https://www.asio.gov.au/> pada 09-09-2017 pukul 21.23 WIB

<sup>11</sup> Australian Government, *Australian Secret Intelligence Service* diakses dalam <https://www.asis.gov.au/> pada 09-09-2017 pukul 21.26 WIB

<sup>12</sup> Australian Government, *Australian Signals Directorate* diakses dalam <https://www.asd.gov.au/> pada 09-09-2017 pukul 21.29 WIB

Australia.<sup>13</sup> Pasal 11 (1) *Intelligence Service Act* menyatakan bahwa mereka boleh beroperasi hanya didasarkan kepentingan keamanan Nasional Australia, Hubungan Luar Negeri Australia atau Kesejahteraan Ekonomi Nasional dan hanya bila hal-hal tersebut dipengaruhi oleh kemampuan, kehendak atau kegiatan pihak-pihak diluar Australia.

Praktik spionase seperti penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia sebenarnya telah lama dilakukan oleh aktor-aktor Internasional, hal ini selalu didasari kekhawatiran akan adanya gangguan kedaulatan sebuah negara terhadap negara lain khususnya negara yang bertetangga atau negara-negara yang berkonflik contohnya Amerika Serikat dan Uni Soviet pada masa Perang Dingin.<sup>14</sup> Penyadapan muncul dengan berkembangnya alat teknologi informasi dan komunikasi serta jaringan internet yang sangat pesat.

### **2.1.1 Penyadapan Australia terhadap Indonesia**

#### **A. Kasus Penyadapan Indonesia oleh Australia**

Kasus penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap Presiden SBY diketahui akibat salah satu dari mantan pegawai NSA yang secara sengaja membocorkan dokumen-dokumen yang berisikan *Spying* Australia terhadap

---

<sup>13</sup> Kompas.com, *Langgar Hukumkah Bila Australia Sadap Telepon Pejabat Indonesia ?* diakses dalam <http://internasional.kompas.com/read/2013/12/05/1544349/Langgar.Hukumkah.bila.Australia.Sadap.Telepon.Pejabat.Indonesia> pada 09-09-2017 pukul 21.33 WIB

<sup>14</sup> Novia Mujiati, Kuswono, Sunarjo, 2016. *United States During The Coldwar 1945-1990*, Cold War, Vol.4 No.01, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, Hal. 39

Indonesia pada tahun 2013.<sup>15</sup> Dokumen rahasia tersebut di bocorkan oleh mantan pegawai NSA yang membelot yaitu Edward Joseph Snowden yang menyebutkan jika beberapa pemerintah Indonesia termasuk para menteri telah disadap melalui jaringan telepon genggam. Dokumen-dokumen tersebut menyebutkan bahwa penyadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dilakukan selama 15 hari pada bulan Agustus 2009 melalui telepon genggam miliknya.<sup>16</sup>

Snowden mengungkapkan jika Australia secara diam-diam telah melakukan spionase terhadap beberapa negara di Asia dan salah satunya yaitu Indonesia. Kegiatan atau operasi ini melibatkan kerjasama antara Australia dengan Amerika Serikat, operasi ini disebut dengan *Top Secret Program* yaitu intersepsi jaringan radio, telekomunikasi serta lalu lintas jaringan internet tanpa sepengetahuan Diplomat Australia di kedutaannya.<sup>17</sup> Hal tersebut terungkap ketika Edward J. Snowden membocorkan dokumen Intelijen "*Nasional Secret Intelligence*" Milik NSA terkait penyadapannya dengan DSD di majalah Jerman "*Germany's Der Spiegel*"<sup>18</sup> dan surat kabar Australia "*Sydney Morning Herald*"<sup>19</sup>

Sebuah daftar berbentuk *slide* presentasi yang berjudul "*3G Impact And Update*" muncul menyebutkan beberapa pemerintah Indonesia yang menjadi target penyadapan yaitu termasuk mantan wakil Presiden Indonesia yaitu Jusuf

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Imam Yuni. *Australia Sadap Telepon SBY 15 Hari*. Diakses dalam <https://nasional.tempo.co/read/530423/australia-sadap-telepon-presiden-sby-15-hari> pada 30 May 2017 pukul 21.56 WIB

<sup>17</sup> Ewen MacAskill dan Lenore Taylor. Loc. Cit

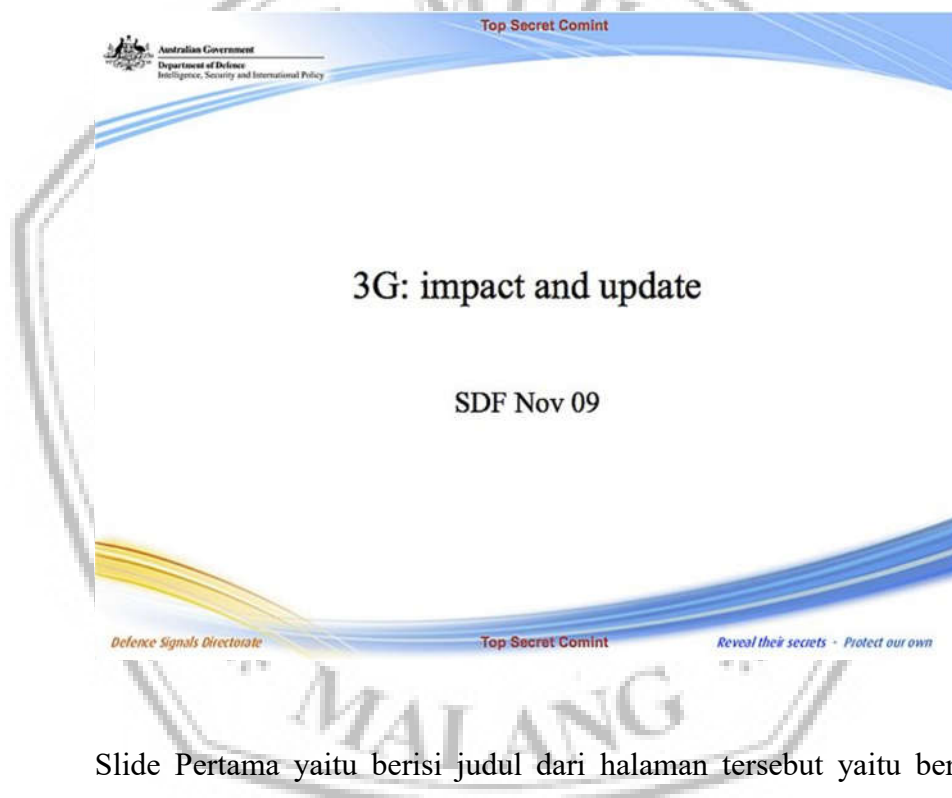
<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Philip Dorling, Michael Bachelard. Edward Snowden Documents Reveal Indonesian Phone Networks Penetrated by Australian Spies. Diakses dalam <http://www.smh.com.au/federal-politics/political-news/edward-snowden-documents-reveal-indonesian-phone-networks-penetrated-by-australian-spies-20140216-32tyu.html> pada 03 Juli 2017 pukul 04.55 WIB

Kalla, juru bicara urusan luar negeri Dino Patti Djalal, juru bicara urusan dalam negeri Andi Mallarangeng, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Widodo Adi Sucipto, Menteri BUMN Sofyan Djalil, Menteri Sekretaris Negara Hatta Radjasa dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.<sup>20</sup>

**Gambar 2.1**

**Slide Pertama dari Dokumen milik DSD yang dibocorkan Snowden<sup>21</sup>**



Slide Pertama yaitu berisi judul dari halaman tersebut yaitu bertuliskan “3G: Impact and Update. SDF Nov 09”.<sup>22</sup> Dokumen berupa slide tersebut memiliki tingkat rahasia yang sangat tinggi bagi negara Australia. Didalam slide pertama juga memberikan penjelasan bahwa file tersebut milik *Departement Of*

<sup>20</sup> Michael Brissenden, *Australia spied on Indonesian cpresident Susilo Bambang Yudhoyono, leaked Edward Snowden documents reveal* diakses dalam <http://www.abc.net.au/news/2013-11-18/australia-spied-on-indonesian-president.-leaked-documents-reveal/5098860> pada 16 Oktober 2017 Pukul 03.38 WIB

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

*Defence/ Defence Signals Directorate* yang dikelola oleh Pemerintah Australia berupa logo milik Badan Pertahanan milik Australia yang diletakan dibagian kiri atas di setiap halamannya. Selain itu, DSD juga memberikan tulisan berupa Motto dari DSD yaitu *"Reveal their secrets – protect our own."* yang memiliki arti “Ungkap Rahasia Mereka – Lindungi Milik Kita Sendiri”. Ungkapan tersebut juga tertera dibagian bawah tiap halaman.

**Gambar 2.2**

**Slide Ke-Dua dari File yang dibocorkan Snowden<sup>23</sup>**

**3G rollouts**

- Nearly complete in SE Asia
  - UMTS and some CDMA2K
  - UMTS predominates
  - Discussions about LTE
- Coincides with IP core rollouts (WAN)
  - Now seeing NGN roll-outs gathering speed

Country	Operator	Launch Date
Cambodia	Shinawatra	Oct-07
Cambodia	Mobilel	Jul-04
Indonesia	Telkomsel	Sep-06
Indonesia	Excelcomindo	Sep-06
Indonesia	Indosat	Nov-06
Indonesia	Hutchison 3G	Dec-06
Malaysia	Maxis Communications	Jul-05
Malaysia	Celcom	May-05
Malaysia	Digi	Mar-06
Philippines	SMART	May-06
Philippines	Globe	May-06
Philippines	Digitel	Jul-06
Singapore	Singapore Telecommunications	Feb-05
Singapore	StarHub	Apr-05
Singapore	MobileOne	Feb-05
Thailand	CTM	May-08

Slide kedua berjudul “*3G Rollouts*” yang berisikan mengenai peluncuran sistem 3G komunikasi milik negara-negara di Asia.<sup>24</sup> Halaman tersebut juga mengungkapkan tabel yang berisikan daftar-daftar Negara di Asia yang menjadi

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*

target Peluncuran 3G dan salah satunya yaitu Indonesia. Selain Indonesia, ada beberapa negara-negara yang menjadi sasaran yaitu Kamboja, Malaysia, Filipina, Singapura serta Thailand. Tabel tersebut juga berisikan mengenai operator dari negara-negara tersebut yang meluncurkan sistem 3G serta waktu peluncurannya.

**Gambar 2.3**

**Daftar Nama-Nama Pemerintah Indonesia yang Menjadi Target Spionase Australia<sup>25</sup>**

	Name/Position	Handset	Generation
1	Susilo Bambang Yudhoyono	Nokia E90-1	3G
2	Kristiani Herawati (First Lady)	Nokia E90-1	3G
3	Boediono (new Vice President)	Blackberry Bold (9000)	3G
4	Yusuf Kalla (former Vice President)	Samsung SGH-Z370	3G
5	Dino Patti Djalal (Foreign Spokesman)	Blackberry Bold (9000)	3G
6	Andi Mallarangeng (Domestic Spokesman)	Nokia E71-1	3G
7	Hatta Rajasa (State Secretary)	Nokia E90-1	3G
8	Sri Mulyani Indrawati (MENKO EKON)	Nokia E90-1	3G
9	Widodo Adi Sucipto (MENKO POLKAM)	Nokia E66-1	3G
10	Sofyan Djalil (Minister + Confidant)	Nokia E90-1	3G

Uptake of 3G handsets commenced in 2<sup>nd</sup> Quarter 2007 – Nokia E90-1

Slide ketiga berjudul “*IA Leadership Targets + Handsets*” berisi daftar nama-nama Pemerintah Indonesia yang menjadi Target Spionase Australia. daftar nama-nama petinggi yang disebutkan dalam slide tersebut diantaranya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ibu Negara Kristiani Herawati (Ani Yudhoyono),

<sup>25</sup> *Ibid.*

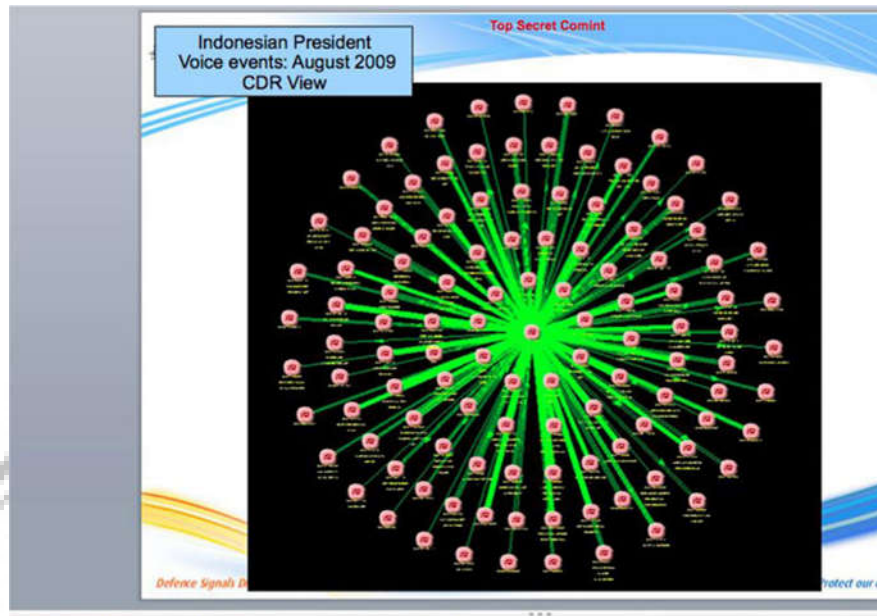


Wakil Presiden Boediono, Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Juru Bicara Luar Negeri Dino Patti Djalal, Juru Bicara Dalam Negeri Andi Malarangeng, Sekretaris Negara Hatta Rajasa, Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Widodo Ali Sucipto serta Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil juga tidak lepas dari target penyadapan. Halaman ketiga juga menyebutkan satu-persatu jenis telepon genggam yang digunakan milik masing-masing target penyadapan serta jaringan yang digunakan.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merupakan Individu yang memiliki peran yang sangat penting sebagai Kepala Negara terkait hal dinamika politik luar negeri Indonesia baik dalam hal ekonomi, keamanan hingga politik global. Daftar nama-nama diatas merupakan individu-individu terdekat Presiden Susilo Bambang yudhoyono dan peran mereka sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil Indonesia. Sehingga Australia sangat dengan mudah mendapatkan informasi tentang Indonesia melalui telepon genggam milik elit politik tersebut. Mengingat telepon genggam merupakan salah satu akses yang sangat mudah untuk berkomunikasi antar satu sama lain.

## Gambar 2.4

### Slide Ke-Empat dari Dokumen Rahasia Australia<sup>26</sup>



CDRs for August only cover 15 days of the month (1,3,4,8->14, and 20->24\*).  
This is voice events only.

Halaman ke-empat dari dokumen rahasia *Defence Signals Directorate* (DSD) yang berisikan gambar yang berjudul “*Indonesian President Events: August 2009 CDR View*” mengenai apa yang disebut tampilan CDR. CDR adalah catatan data panggilan yang bisa memantau siapa yang dipanggil dan siapa yang memanggil tapi belum tentu dapat mengetahui apa yang dikatakan.<sup>27</sup>

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

**Gambar 2.5**

**Slide ke-Lima dari dokumen rahasia milik Australia<sup>28</sup>**



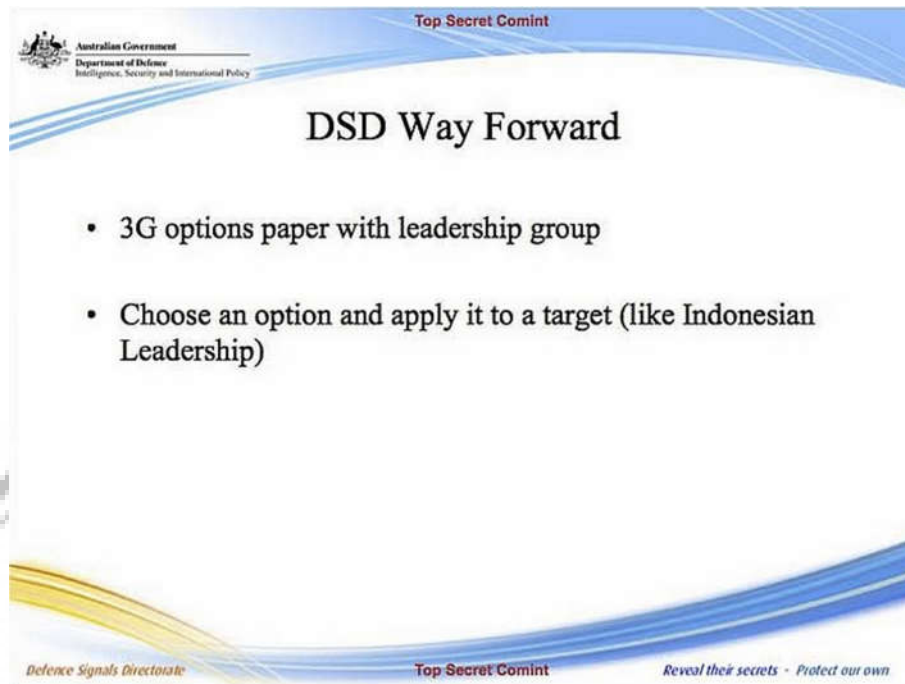
Slide selanjutnya yang berjudul “*Indonesian President Voice Intercept (August '09)*” berisikan Halaman lain menunjukkan bahwa setidaknya pada satu kesempatan, intelijen Australia berusaha mendengarkan salah satu percakapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun menurut catatan di bagian bawah halaman, panggilan itu kurang dari satu menit dan karena itu tidak bertahan cukup lama untuk bisa berhasil disadap.<sup>29</sup>

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*

Gambar 2.6

Slide Terakhir dari Dokumen Rahasia Milik Australia<sup>30</sup>



Halaman terakhir yaitu mempunyai judul “*DSD Way Forward*” yang berisikan tentang rencana DSD setelah penjelasan-penjelasan pada *slide-slide* sebelumnya.<sup>31</sup> Didalam *slide* tersebut terdapat dua poin rencana DSD yang pertama yaitu “*3G Options Paper With Leadership Group*” dan yang kedua yaitu “*Choose an Optional and Apply it to a Target (Like Indonesian Leadership)*”. Kedua poin tersebut memiliki tujuan yaitu untuk memata-matai sasaran guna mendapatkan informasi dari Indonesia.

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman menjelaskan bahwa Australia telah melakukan penyadapan terhadap percakapan telepon

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid.*

sejumlah pemerintah Indonesia ketika KTT di Bali pada tahun 2007<sup>32</sup> dan ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghadiri Konferensi G-20 di London tahun 2009.<sup>33</sup> Dalam dokumen yang dibocorkan Snowden tersebut juga menyebutkan bahwa fasilitas yang mereka gunakan dalam melakukan tindakan penyadapan biasa diletakkan secara rahasia di miniatur-miniatur bangunan ataupun di atap gedung pemeliharaan di beberapa kantor kedutaan.<sup>34</sup> Elite politik di Ibu Kota Jakarta bisa dikatakan “terlalu banyak bicara” dan bahkan mereka sendiri tidak akan sadar jika badan intelijen Indonesia yang melakukan penyadapan dikutip dari *International Business Times* Australia, mantan DSD menyatakan bahwa,

*“Cellular networks are a great boon, and the Jakarta elite is a very talkative group. They even remained rambunctious despite feeling their own Indonesian intelligence agent who tapped them”*<sup>35</sup>

Salah satu data yang dibutuhkan oleh Australia yaitu tentang Terorisme dan *People Smuggling* yang masih sering banyak terjadi. Terorisme dan para Imigran gelap kerap datang ke Australia melalui jalur laut Indonesia.

Penyadapan yang dilakukan oleh Australia memberikan kerugian terhadap negara Indonesia. Terkait kasus penyadapan yang dilakukan Australia, negara tersebut dianggap telah melecehkan bangsa Indonesia dan dalam kasus

---

<sup>32</sup>Tim BBC. *BIN: Australia Menyadap Indonesia sejak 2007*. Diakses dalam [http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2013/11/131120\\_bin\\_sadap\\_australia](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2013/11/131120_bin_sadap_australia) pada 18 juni 2017 pukul 04.34 WIB

<sup>33</sup>Ibid.

<sup>34</sup>Ita Lismawati F. Malau, Nila Chrisna Yulika, *Sadap Indonesia, Australia Langgar Konvensi Wina: Australia melancarkan aksi spionase kepada Indonesia*, <http://politik.news.viva.co.id/news/read/460248-sadap-indonesia--australia-langgar-konvensiwina> pada 18 September 2017 pukul 01.24 WIB

<sup>35</sup>Vivanews, *Spionase Kangguru di Tanah Garuda*, diakses dalam <http://sorot.news.viva.co.id/news/read/457214-spionase-kangguru-di-tanah-garuda> pada 16 Agustus 2017 pukul 15.38 WIB

nasionalisme Australia melanggar kedaulatan NKRI yang menyangkut kerahasiaan negara dan informasi negara. Disamping itu penyadapan ini juga dilakukan terhadap petinggi-petinggi negara Indonesia, dalam kasus ini, hal tersebut merupakan masalah serius apabila data atau informasi yang diperoleh disalahgunakan oleh Negara lain.

## **B. Proses dibalik Penyadapan**

Pada tahun 2007 *Defence Signals Directorate* (DSD) yaitu badan intelijen Australia secara sengaja datang ke Indonesia dengan tujuan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang berlangsung di Nusa Dua, Bali.<sup>36</sup> Departemen ini merupakan milik Australia dibawah menteri pertahanan Australia dan di dalamnya dibagi atas beberapa kelompok agen berdasarkan operasi keamanan negara dan salah satu dari kelompok tersebut yaitu *Australian Signals Directorate* (ASD) yang termasuk dalam kelompok operasi intelijen keamanan Australia.<sup>37</sup> Pada saat itu DSD memiliki tujuan khusus untuk datang ke Indonesia, salah satunya yaitu untuk mencari tahu dan mengumpulkan nomor-nomor telepon yang dipakai pejabat untuk berkomunikasi khususnya para pejabat tinggi dalam bidang pertahanan dan keamanan Indonesia.<sup>38</sup> Dalam skala Internasional ASD berada didalam naungan instansi yang bernama *The Five Eyes* kelompok lima

---

<sup>36</sup>Liputan 6 News, Australia – AS Kerja Sama Sadap Indonesia saat KTT Bali 2007?, URL: <http://news.liputan6.com/read/736810/australia-as-kerja-sama-sadap-indonesia-saat-ktt-bali-2007> diakses pada 1 Mei 2017 pukul 03.44 WIB

<sup>37</sup>*Departemen Pertahanan Australia* diakses dalam <http://www.defence.gov.au/ISG/> pada 12 Agustus 2017 pukul 02.44 WIB

<sup>38</sup>Ewen MacAskill dan Lenore Taylor. *Loc. Cit.*

negara yang bergerak dalam bidang operasi intelijen Internasional bersama Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Selandia Baru dan Australia.<sup>39</sup>

Tugas utama dari ASD yaitu sama seperti Motto dari Departemen tersebut yaitu *“Reveal Their Secret, Protect Our Own”*<sup>40</sup> yang memiliki makna jika mereka selalu berusaha untuk mengetahui rahasia milik negara-negara lain terutama negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Australia, sedangkan mereka akan sangat melindungi rahasia-rahasia milik Australia dari negara lain. Tujuan ASD merujuk pada *Intelligence Service Act 2001*:<sup>41</sup>

1. *Obtain signals intelligence about the capabilities, intentions or activities of people or organization outside of Australia*
2. *Communicate such intelligence in accordance with the Australian government's requirements*
3. *Provide material, advice and other assistance to commonwealth and state authorities on matters relating to the security and integrity of information that is processed, stored or communicated by electronic or similar means*
4. *Provide assistance to the Australian defence Force in support of military operation and cooperate with the Australian Defence Force on Intelligence matters*

---

<sup>39</sup> *The Five Eyes* diakses dalam <https://www.privacyinternational.org/?q=node/51> pada 11 November 2017 12.35 WIB

<sup>40</sup> Michael Brissenden. *Loc. Cit*

<sup>41</sup> Australian Government. *ASIS Privacy Rules*. Diakses dalam <https://www.asis.gov.au/Privacy-rules.html> pada 01 Agustus 2017 Pada 03.32 WIB

5. *Provide Assistance to Commonwealth and State authorities on relation to cryptography, computer and communications technologies, other specialized technologies acquired in connection with the performance of its functions, and the performance of search and rescue functions by Commonwealth and State authorities.*

*Intelligent Service Act 2001* menjelaskan jika tujuan yang pertama yaitu memperoleh sinyal intelijen tentang niat dan kegiatan individu atau organisasi diluar Australia, kedua menjelaskan bahwa mengkomunikasikan kegiatan intelijen tersebut sesuai dengan permintaan pemerintah Australia, ketiga yaitu menyediakan alat-alat yang diperlukan untuk kegiatan intelijen serta bantuan-bantuan lainnya kepada otoritas persemakmuran dan negara mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keamanan dan integritas informasi yang diproses, disimpan atau dikomunikasikan dengan cara elektronik atau sejenis. Keempat yaitu Memberikan bantuan kepada Angkatan Pertahanan Australia untuk mendukung operasi militer dan bekerja sama dengan Angkatan Pertahanan Australia mengenai masalah Intelijen dan yang kelima yaitu memberikan Bantuan kepada Pemerintah Persemakmuran dan Negara Bagian terkait dengan teknologi kriptografi, komputer dan komunikasi, teknologi khusus lainnya yang diperoleh sehubungan dengan kinerja fungsinya, dan kinerja fungsi pencarian dan penyelamatan oleh otoritas Persemakmuran dan Negara Bagian.

Pada saat itu DSD tidak bekerja sendiri dalam misinya, bekerjasama dengan *National Security Agency (NSA)* dari Amerika Serikat.<sup>42</sup> Amerika Serikat disini

---

<sup>42</sup>*Ibid.*



juga memiliki kepentingan sendiri yaitu guna memantau struktur jaringan komunikasi Indonesia.<sup>43</sup> Namun DSD hanya mendapatkan nomor telepon Kapolda Bali yang menjabat pada saat itu yaitu Irjen. Pol. Paulus Purwoko.<sup>44</sup> DSD sendiri tidak berhenti sampai disitu saja melainkan terus berusaha melakukan aksi penyadapan tersebut hingga mendapatkan hasil yang mereka inginkan yaitu mendapatkan rekaman pembicaraan Kepala Negara Indonesia. Mereka membangun jaringan untuk penyadapan tepatnya di gedung Kedutaan Besar Australia yang berada di Jakarta.<sup>45</sup> Dengan alat yang dipasang oleh DSD tersebut, mereka secara mudah menerima segala informasi dari Indonesia contohnya saja ekonomi, keamanan, sosial dan lain sebagainya.

DSD akhirnya dapat menyadap telepon genggam milik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2009 ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghadiri acara G-20 di London.<sup>46</sup> Kegiatan tersebut dilakukan dengan cara menyadap telepon genggam milik Susilo Bambang Yudhoyono serta ibu Negara Ani Yudhoyono. Penyadapan tersebut tidak hanya dilakukan pada telepon Presiden saja namun banyak dari menteri-menteri yang menjabat pada

---

<sup>43</sup> Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI. 2013. *SIKAP INDONESIA TERHADAP ISU PENYADAPAN AMERIKA SERIKAT DAN AUSTRALIA*, Info Singkat, Vol.5, No.21, Hal.6

<sup>44</sup> The Guardian, *NSA: Australia and US used Climate Change Conference to Spy on Indonesia*. Diakses dalam <http://www.theguardian.com/world/2013/nov/02/nsa-australia-bali-conference-spyindonesia> pada 11 Agustus 2017 Pukul 02.34 WIB

<sup>45</sup> Liputan 6 News, *Australia – AS Kerja Sama Sadap Indoneia saat KTT Bali 2007?*, diakses dalam <http://news.liputan6.com/read/736810/australia-as-kerja-sama-sadap-indonesia-saat-ktt-bali-2007> pada 16 Agustus 2017 pukul 04.23 WIB

<sup>46</sup> Detiknews, *Eks Intelijen CIA Edward Snowden, di Tengah Kasus Penyadapan SBY*, diakses dalam <http://news.detik.com/read/2013/08/01/042511/2320717/10/eks-intelijen-cia-edward-snowden-ditengah-kasus-penyadapan-sby> pada 16 Agustus 2017 pukul 15.13 WIB

tahun 2009 juga ikut disadap.<sup>47</sup> Wakil presiden pada saat itu yaitu Boediono juga tidak lepas dari penyadapan tersebut.<sup>48</sup>

Kepentingan Australia yang lain yaitu kerjasama perdagangan dalam bidang peternakan karena Indonesia merupakan Negara dengan pasar utama peternak sapi Australia.<sup>49</sup> Dengan adanya kasus yang dialami oleh Indonesia dengan Australia, maka akan menimbulkan dampak buruk juga bagi Australia. Ketika Kementerian Pertanian membatasi kuota impor daging sapi, peternak Australia mengalami kerugian yang besar.

Berdasarkan hal tersebut, Indonesia telah melakukan interaksi dengan Australia dalam rangka memperbaiki hubungannya. Namun dari pihak Australia tidak memberikan tanggapan apapun kepada Indonesia. Hal tersebut membuat pihak Indonesia kecewa sebab tidak ada jawaban apapun dari Australia mengenai penyadapan tersebut. Perdana Menteri Australia Tony Abbott mengatakan bahwa semua pemerintah mengetahui bahwa tiap pemerintah mengumpulkan informasi dan pemerintah Australia tidak pernah berkomentar mengenai masalah-masalah intelijen secara spesifik.<sup>50</sup>

Selain itu pernyataan dari Perdana Menteri Australia, Tony Abbott yang mengatakan bahwa setiap badan dan agen intelijen yang bekerja untuk Australia

---

<sup>47</sup>Kilas Balik perang hacker antara Indonesia VS. Australia diakses dalam <http://tekno.liputan6.com/read/826144/kilas-balik-perang-hacker-indonesia-vs-australia> diakses pada 14 februari 2014 pukul 06.45 WIB

<sup>48</sup>Liputan 6 News, *Snowden: Ponsel SBY Disadap Australia*, diakses dalam <http://news.liputan6.com/read/748895/snowden-ponsel-sby-disadap-australia> pada 16 Agustus 2017 Pukul 15.15 WIB

<sup>49</sup>Agib Tanjung. *Australia Menyadap Karena Sangat Tergantung Kepada Indonesia*, diakses dalam <https://www.merdeka.com/peristiwa/australia-menyadap-karena-sangat-tergantung-kepada-indonesia.html> Pada 03 Oktober 2017 Pukul 1.10 WIB

<sup>50</sup>ABC News, *Australia Spied on Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono, leaked Edward Snowden Documents Reveal*, diakses dalam <https://www.abc.net.au/news/2013-11-18/australia-spied-on-indonesian-president-leaked-documents-reveal/5098860>

selalu melaksanakan tugasnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Ia tidak dapat memberi kejelasan mengenai isu penyadapan ini. Pihak Australia tetap tidak mau memberi penjelasan mengenai isu penyadapan. Hal ini diketahui setelah Dubes Australia untuk RI yang bernama Greg Moriarty juga tidak dapat memberi tanggapan atas pemanggilan dirinya oleh Kementerian Luar Negeri RI terkait spionase yang dilakukan Australia. Ia hanya mengatakan bahwa pihak Australia hanya mengikuti perkembangan berita di Indonesia.<sup>51</sup>

## **2.2 Akibat Penyadapan yang dilakukan Oleh Australia terhadap Indonesia**

Aksi penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia merupakan kasus penyalahgunaan kemajuan TIK dalam kancah internasional. Oleh karena itu, semua negara dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya harus mempertanggungjawabkan tindakan yang akan mereka lakukan, apakah tindakan tersebut dapat merugikan pihak lain atau tidak.

Dengan adanya tindakan spionase yang dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia ini kemudian menimbulkan kecaman dari banyak pihak dari Indonesia. Bahkan masyarakat Australia yang menolak akan kegiatan spying ini pun juga ikut mengecam badan intelejen Australia yang melakukan spying tersebut. Banyak pihak yang menuntut presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono agar bersikap tegas dalam menghadapi tindakan Australia itu.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup>Vivanews, *Spionase Kangguru di Tanah Garuda*, Loc.cit

<sup>52</sup>Tim BBC Indonesia. *Indonesia 'perlu keras' kepada Australia*. Diakses dalam [http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita\\_indonesia/2013/11/131119\\_indonesiaaussiereaction.shtml](http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2013/11/131119_indonesiaaussiereaction.shtml) pada 07 Oktober 2017, pukul 01.22 WIB

Pemerintah Indonesia pun menanggapi penyadapan tersebut dengan cara menarik Duta Besar Republik Indonesia untuk Australia yang berada di Canberra, seperti pernyataan Menteri Luar Negeri pada saat itu yaitu Marty Natalegawa,

“... Memutuskan untuk memanggil pulang duta besar Indonesia di Canberra untuk konsultasi. Mustahil dan tidak mungkin seorang duta besar Indonesia di suatu negara dalam kaitan ini di Canberra Australia, bisa melakukan tugas-tugasnya seperti lazimnya, ditengah suasana yang sangat mengganggu ini. Pemanggilan duta besar untuk konsultasi merupakan langkah yang tidak bisa dianggap ringan, namun langkah yang minimum perlu kita lakukan untuk bisa mengkonsolidasi situasi dan menunjukan sikap kita yang tegas dan terukur, ...”<sup>53</sup>

Pemerintah Indonesia mengambil langkah untuk menarik Duta Besar Indonesia untuk Australia, Nadjib Riphath Kesoema. Dubes Nadjib Riphath Kesoema, mengaku menurut saja terhadap apa pun keputusan yang diambil Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dan Menteri Politik Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto.<sup>54</sup> Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menegaskan juga jika Indonesia tidak terima dengan alasan apapun mengenai penyadapan yang dilakukan oleh Australia. Dalam jumpa pers dengan beberapa media di ruang Nusantara Kemlu, Jakarta tanggal 18 November 2013 menyatakan jika tidak bisa menerima bahwa ada penyadapan terhadap pemimpin-pemimpin Indonesia dengan alasan kepentingan nasional Australia,

---

<sup>53</sup> Andylala Waluyo, Protes Penyadapan, Indonesia Tarik Dubes RI untuk Australia diakses dalam <http://www.voaindonesia.com/a/indonesia-panggil-dubes-australia-soal-dugaan-mata-mata/1792253.html> pada 09 Oktober 2017 pukul 02.46 WIB

<sup>54</sup> Tim VIVA, “Ditarik Pulang, Ini Tanggapan Dubes Indonesia Untuk Australia”, diakses dalam <http://www.viva.co.id/berita/dunia/459516-ditarik-pulang-ini-tanggapan-dubes-indonesia-untuk-australia> 12 September 2017 pukul 12:09 WIB

“...Kita tidak bisa menerima kenyataan bahwa ada penyadapan terhadap pemimpin-pemimpin Indonesia dengan alasan kepentingan nasional Australia. Ini melanggar hukum internasional, dan jelas melanggar rasa persahabatan antara kedua Negara...”<sup>55</sup>

Pemerintah Indonesia juga mengambil langkah untuk memanggil Kuasa Usaha Ad Interim<sup>56</sup> Kedubes Australia di Jakarta dan pembahasan bersama pihak Kemenlu Australia. Tidak hanya dengan pihak Australia, Duta Besar Indonesia di Canberra juga turut dipanggil ke Jakarta untuk membicarakan masalah tersebut lebih lanjut. Selain itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga mengungkapkan bahwasanya Indonesia akan mengkaji ulang hubungan bilateral yang telah tercipta antara Indonesia dengan Australia selama ini, namun SBY tidak menyebutkan rincian kerjasama bilateral yang dimaksudkan tersebut.<sup>57</sup>

Kegiatan penyadapan tersebut sangat disayangkan oleh Marty Natalegawa, menurutnya dengan adanya tukar-menukar informasi antar kedua Negara sangat banyak manfaatnya, "...Berkat kerjasama seperti inilah kita misalnya berhasil membongkar ancaman terorisme, membongkar jejaring *people smuggling*..."<sup>58</sup> dengan melakukan kegiatan penyadapan terhadap Kepala Negara beserta Menteri-menterinya tersebut menimbulkan hubungan antara Indonesia dengan Australia menjadi memburuk. Padahal jika dengan melakukan tukar-menukar informasi

---

<sup>55</sup> Politik Indonesia, *Indonesia, Brasil dan Jerman Ajukan Resolusi Penyadapan ke PBB*” diakses dalam <http://www.politikindonesia.com/index.php?k=politisiana&i=50252-Indonesia,%20Brasil%20dan%20Jerman%20Ajukan%20Resolusi%20Penyadapan%20ke%20PBB>

<sup>56</sup> Ad interim adalah ungkapan Latin yang artinya adalah "sementara". Ungkapan ini sering digunakan untuk merujuk kepada pejabat sementara dalam bidang pemerintahan. Diakses dalam <https://kbbi.web.id/interim> pada 03 Oktober 2017 Pukul 1.16 WIB

<sup>57</sup> Tim BBC Indonesia. *Indonesia ‘perlu keras’ kepada Australia*. Diakses dalam [http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita\\_indonesia/2013/11/131119\\_indonesiaaussiereaction.shtml](http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2013/11/131119_indonesiaaussiereaction.shtml) pada tanggal 08 Oktober 2017 pukul 06.47 WIB

<sup>58</sup> Ibid.

antar Negara secara terbuka, hubungan Indonesia dengan Australia tidak akan memburuk seperti saat itu.<sup>59</sup>

Selain menarik pulang Duta Besar Indonesia di Canberra, pemerintah Indonesia juga mengambil keputusan untuk menghentikan sementara kerjasama antara Indonesia dengan Australia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan pernyataan jika pihak Indonesia masih menunggu penjelasan dari pihak Australia terkait aksi penyadapan tersebut, sementara menunggu respon dari Australia, pemerintah Indonesia perlu mengkaji ulang kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara.<sup>60</sup> Dalam pidatonya di Istana Negara pada Rabu 20 November 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pernyataannya dikutip dari berita online BBC Indonesia,

"...Saya minta dihentikan dulu kerja sama yang disebut pertukaran informasi dan pertukaran intelijen di antara kedua negara, Saya juga minta dihentikan dulu latihan latihan bersama antara tentara Indonesia-Australia, baik Angkatan Darat, Laut dan Udara, maupun yang sifatnya gabungan. Saudara tahu menghadapi problem *people smuggling* yang merepotkan Indonesia dan Australia, kita punya kerja sama militer. Ini saya minta dihentikan dulu sampai semuanya jelas. Untuk keberlanjutan kerja sama di masa depan, maka kita memerlukan semacam protokol *code of conduct* dan sekaligus *guiding principles* menyangkut kerja sama dan kemitraan di berbagai bidang yang bersifat mengikat dan dijalankan..."<sup>61</sup>

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto memastikan warga negara Indonesia yang tengah menempuh pendidikan atau bekerja di Australia tetap dijamin keamanannya, demikian juga dengan warga

---

<sup>59</sup> Ibid.

<sup>60</sup> Andreas Nugroho. *Indonesia Hentikan Sementara Kerjasama Australia*. Diakses dalam [http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2013/11/131120\\_sbyaustraliahalt](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2013/11/131120_sbyaustraliahalt) pada 12 juni 2017 pukul 01.44 WIB

<sup>61</sup> Ibid.

negara Australia yang beraktivitas di Indonesia hingga pengamanan kantor Kedutaan Besar Australia. Djoko Suyanto dalam pernyataannya,

“Tetap kita protect kepentingan dan keamanan mereka supaya tidak terganggu dengan hubungan politik yang dinamis ini. Tanggung jawab pemerintah masing-masing untuk melindungi warga negaranya di manapun berada. Termasuk pengamanan kantor Kedubes Australia di Jakarta,”

Perdana Menteri Australia yaitu Tony Abbott tidak dapat memberikan penjelasan mengenai kegiatan penyadapan yang dilakukan oleh Australia. Duta besar Australia untuk Indonesia Greg Moriarty juga tidak dapat memberi tanggapan yang jelas atas pemanggilan dirinya oleh Kementrian Luar Negeri Indonesia mengenai kasus spionase tersebut dan ia hanya menyatakan jika mengikuti perkembangan berita di Indonesia.<sup>62</sup>

Guru besar Universitas Indonesia memberi tanggapan mengenai kasus yang dialami Indonesia ini, Hikmahanto mengatakan bahwa untuk mengatasi kegiatan spying yang dilakukan oleh Australia ini, pemerintah Indonesia perlu bersikap lebih tegas lagi kepada negara kangguru tersebut. Langkah yang ditempuh SBY untuk memulangkan Duta Besar Indonesia dari Australia sudah merupakan jalan yang benar, akan tetapi untuk meindaklanjuti mungkin Indonesia perlu untuk mengusir diplomat-diplomat Australia yang ada di Indonesia (*persona-grata*).<sup>63</sup> Menurut Hikmahanto, memersonna-gratakan diplomat negara

---

<sup>62</sup> Vivanews, *Spionase Kangguru di Tanah Garuda. Loc. Cit.5*

<sup>63</sup> Presiden SBY didesak Tegas Terhadap Australia, diakses dalam <http://www.solopos.com/2013/12/08/penyadapan-australia-presiden-sby-didesak-tegas-terhadap-australia-472383> pada 06 oktober 2017 pada 22.58 WIB

yang dianggap bersalah merupakan cara yang wajar yang dilakukan oleh negara-negara pada masa perang dingin.<sup>64</sup>

Kegiatan *spying* yang dilakukan oleh Australia ini di anggap sangat memalukan mengakibatkan pemerintah Indonesia dan *non-state actor* pun juga tidak terima apabila Badan Intelijen Australia menyadap Kepala Negara Indonesia. Suatu kelompok yang menamakan diri dari mereka sebagai *anonymous Indonesia* terbentuk ketika berita *spying* yang dilakukan oleh Australia terkuak. Kelompok ini beranggotakan para ahli informatika dan para *hacker* dari Indonesia yang peduli akan kegiatan *spying* Australia terhadap Indonesia. Salah satu kepedulian mereka yaitu dengan cara meng-*hack* situs-situs yang berbasis di Australia. Situs-situs yang dimaksud bukanlah situs resmi milik Australia melainkan situs-situs web Australia milik swasta.

Anonymous memang bukan benar-benar sebuah organisasi, mereka adalah grup besar individual (*Hacker*) yang mempunyai ketertarikan yang sama, sehingga sering dikatakan semua orang bisa menjadi Anonymous.<sup>65</sup> *Schaefer's Sociological Glossary* mendefinisikan sebuah kelompok Anonymous sebagai sejumlah orang dengan norma yang sama, nilai yang sama, dan saling berinteraksi secara teratur.<sup>66</sup> Nama Anonymous sendiri mengingatkan para pengguna internet

---

<sup>64</sup> Ibid.

<sup>65</sup> Wicak Hidayat, Yayan Sopyan. 2007. "*Di balik Kisah-Kisah Hacker Legendaris*" Jakarta: Mediakita, hal. 20-21

<sup>66</sup> McGraw-Hill Online Learning Center. 2013. "Schaefer's Sociological Glossary." Diakses dalam [http://highered.mheducation.com/sites/0072435569/student\\_view0/glossary.html](http://highered.mheducation.com/sites/0072435569/student_view0/glossary.html) pada 07 Oktober 2017 Pukul 12.18 WIB



dengan grup Anonymous lainnya di mancanegara yang telah meretas ke beberapa situs besar seperti Visa, Master Card, PayPal, dan masih banyak lainnya.<sup>67</sup>

Indonesia dan Australia memiliki beberapa kepentingan bersama seperti:<sup>68</sup>

1. Australia selalu berusaha untuk menjadikan Indonesia yang merupakan negara terbesar di Asia Tenggara, tetap terbuka dalam hal wilayah maritimnya karena menyangkut kepentingan strategis Australia.
2. Indonesia dan Australia memiliki kepentingan bersama untuk melindungi kepentingan maritimnya, yang tidak saja untuk keamanan tradisional, tetapi juga untuk keamanan non-tradisional, yang meliputi kejahatan transnasional, seperti terorisme, penyelundupan senjata, migrasi ilegal, perdagangan manusia, peredaran obat-obat terlarang, serta masalah-masalah keamanan lainnya, yang sering menggunakan dimensi laut sebagai medan operasinya.

Sikap yang diberikan oleh Perdana Menteri Australia, Tony Abbot atas Australia dalam aksi spionase terhadap Indonesia melemahkan proses pembangunan kepercayaan yang sedang dibina kedua negara. Sedangkan Tony Abbott harus melihat ini sebagai kesempatan untuk mengubah hubungan bilateral yang tidak tenang menjadi satu yang dibangun atas kepercayaan dan rasa hormat.

---

<sup>67</sup> “Siapa Dibalik Grup Hacker Anonymous Indonesia” diakses dalam <https://inet.detik.com/security/d-2156117/siapa-di-balik-grup-hacker-anonymous-indonesia> pada 07 Oktober 2017 pukul 12.25 WIB

<sup>68</sup> Eky Prasetyo, 2008. *“Hubungan Indonesia-Australia Di Bawah Pemerintahan Perdana Menteri Kevin Rudd”*, hal. 54

### 2.3 Penyadapan Menurut Hukum Internasional

Pengertian penyadapan di atur dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yaitu kegiatan memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi untuk tujuan mendapatkan informasi dengan cara tidak sah. Pada dasarnya informasi yang di miliki oleh seseorang adalah hak pribadi yang harus di lindungi sehingga penyadapan harus dilarang<sup>69</sup>. Kegiatan penyadapan merupakan suatu hal yang sudah sering terjadi mewarnai kehidupan politik dalam sejarah Perang Dingin. Pada Perang Dingin tindakan spionase dan penyadapan dianggap sebagai strategi yang jitu untuk para pihak dalam melakukan tindakan. Penyadapan tidak hanya bersifat domestik, namun seiring dengan kemajuan teknologi kegiatan spionase secara fisik ataupun melalui teknologi, penyadapan kerap dilakukan dan *borderless*.<sup>70</sup> Alat penyadap melalui telepon ditemukan di Amerika serikat sekitar tahun 1890 dan dilegalisasikan oleh badan intelijen Amerika, FBI (*Federal Bureau Investigation*) pada tahun 1928.<sup>71</sup>

Pada perkembangannya, kegiatan penyadapan atau spionase tidak hanya menyangkut masalah kenegaraan saja namun juga menyangkut masalah politik, sosial, ekonomi, terorisme, militer hingga *People Smuggling*. Kegiatan penyadapan tersebut tidak menutup kemungkinan jika dapat dilakukan oleh Negara-negara didunia. Setiap Negara mempunyai peraturan-peraturan sendiri

---

<sup>69</sup> Pasal 40 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

<sup>70</sup> Bayu Sujadmiko, Jurnal Online : Penyadapan Lintas Negara/ Kedaulatan Ditinjau dari Hukum Internasional diakses dalam <https://www.researchgate.net/publication/305462455> pada 29 Agustus 2017 pukul 21.42 WIB

<sup>71</sup> Are FBI Special Agents Permitted to Install Wiretaps at Their Own Direction? Diakses dalam <https://www.fbi.gov/about/faqs/are-fbi-special-agents-permitted-to-install-wiretaps-at-their-own-discretion> pada 29 Agustus 2017 pada 21.24 WIB

mengenai penyadapan, namun jika masalah penyadapan tersebut dilakukan oleh antar Negara atau lintas Negara maka akan sulit untuk diselesaikan mengingat setiap Negara memiliki aturan-aturan domestik dalam menyikapi kegiatan spionase. Australia sendiri mempunyai peraturan sendiri mengenai penyadapan yang disahkan pada tanggal 1 Desember 2014 "*Telecommunications (Interception and Access) Act 1979*" yang secara khusus mengatur mengenai larangan penyadapan telekomunikasi.<sup>72</sup>

Dengan ditandatanganinya konvensi *Vienna Convention on Diplomatic Relation* 1961<sup>73</sup> menjelaskan jika kegiatan spionase yang dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia melanggar konvensi tersebut. Konvensi tersebut ditandatangani oleh beberapa Negara yaitu Indonesia, Australia, Amerika Serikat. Pasal 41 ayat 1 dan 3 konvensi Wina menjelaskan jika disebutkan bahwa anggota-anggota misi diplomatik harus menghormati hukum dan peraturan dari negara

---

<sup>72</sup>Telecommunications (Intercept and Access) Act 1979 diakses dalam <http://www.comlaw.gov.au/Details/C2014C00786/Html/Text>, pada 30 Mei 2017 pukul 00.55 WIB

<sup>73</sup>*Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 (Vienna Convention 1969)* mengatur mengenai Perjanjian Internasional Publik antar Negara sebagai subjek utama hukum internasional. Konvensi ini pertama kali *open for ratification* pada tahun 1969 dan baru *entry into force* pada tahun 1980. Sebelum adanya Vienna Convention 1969 perjanjian antar negara, baik bilateral maupun multilateral, diselenggarakan semata-mata berdasarkan asas-asas seperti, *good faith*, *pacta sunt servanda* dan perjanjian tersebut terbentuk atas *consent* dari negara-negara di dalamnya. Singkatnya sebelum keberadaan Vienna Convention 1969 Perjanjian Internasional antar Negara diatur berdasarkan kebiasaan internasional yang berbasis pada praktek Negara dan keputusan-keputusan Mahkamah Internasional atau Mahkamah Permanen Internasional (sekarang sudah tidak ada lagi) maupun pendapat-pendapat para ahli hukum internasional (sebagai perwujudan dari *opinion juris*). Maka Vienna Convention 1969 merupakan induk dari pengaturan perjanjian internasional karena konvensi ini merupakan konvensi pertama yang berisikan pengaturan perjanjian internasional, baik secara teknis maupun material dan ketentuan dalam konvensi ini merupakan kumpulan dari kebiasaan-kebiasaan internasional selama ini yang berkaitan dengan perjanjian internasional. Bahkan dewasa ini Vienna Convention 1969 telah dianggap sebagai kebiasaan internasional yang mengikat bahkan Negara yang tidak menjadi pesertanya. A.K. Syahmin, 1985, *Hukum Perjanjian Internasional (Menurut Konvensi Wina 1969)*, C.V. Armico, Bandung hal. 72

penerima dan dijelaskan juga bahwa negara tempat misi dilaksanakan tidak digunakan sesuai dengan fungsi misi,

*“Without prejudice to their privileges and immunities, It is the duty of all persons enjoying such privileges and immunities to respect the laws and regulations of the receiving State. They Also have a duty not to interfere in the internal affairs of that State”<sup>74</sup>*

*“The premises of the mission must not be used in any manner incompatible with the functions of the mission as laid down in the present Convention or by other rules of general international law or by any special agreements in force between the sending and the receiving State.”<sup>75</sup>*

Penyadapan yang dilakukan oleh Badan Intelijen Australia terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut menimbulkan banyak perdebatan terhadap Hukum Internasional. Pada umumnya Hukum Internasional tidak ada yang mengatur secara rinci mengenai kegiatan penyadapan antar negara. Namun negara yang disadap dapat menerapkan hukum yang berlaku di negaranya sesuai peraturan negaranya apabila pelaku berada di wilayah negara tersebut.

Dalam kasus penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia, Indonesia dapat membawa kasus tersebut ke Mahkamah Internasional mengingat kegiatan tersebut telah melanggar Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik. Kemudian Mahkamah Internasional akan menentukan ada tidaknya

---

<sup>74</sup>Pasal 41 ayat (1) Vienna Convention On Diplomatic Relations 1961 (Konvensi Wina 1961 Mengenai Hubungan Diplomatik)

<sup>75</sup>Pasal 41 ayat (3) Vienna Convention On Diplomatic Relations 1961 (Konvensi Wina 1961 Mengenai Hubungan Diplomatik)

perjanjian internasional yang dilanggar.<sup>76</sup> Hal yang berikutnya yang harus dipenuhi oleh negara pelapor adalah mempunyai bukti yang cukup yang menyatakan bahwa pelaku penyadapan atau spionase adalah organ negara atau *agen of state*. Jika pelaku penyadapan adalah pihak swasta maka kasus ini tidak bisa dibawa ke Mahkamah Internasional.<sup>77</sup>

Mengenai kegiatan spionase yang dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia, para pemimpin masing-masing negara telah berkomentar mengenai kasus tersebut. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberi pernyataan jika kegiatan penyadapan tidak boleh dilakukan menurut Hukum Indonesia, Hukum Australia Maupun Hukum Internasional.<sup>78</sup>

Di Indonesia hanya memperbolehkan pengawasan warga negaranya sendiri dalam keadaan tertentu. Maka jika ada agen-agen dari negara lain yang melakukan penyadapan dalam wilayah Indonesia termasuk kegiatan yang illegal.<sup>79</sup> Menteri Luar Negeri pada saat itu Marty Natalegawa dalam jumpa pers 18 November 2013 menyampaikan kekecewaannya terhadap Australia dan menyayangkan kegiatan spionase tersebut.

“...Kita tidak bisa menerima kenyataan bahwa ada penyadapan terhadap pemimpin-pemimpin Indonesia dengan alasan kepentingan nasional Australia. Ini melanggar hukum

---

<sup>76</sup>Pasal 36 *Statute of the International Court of Justice* (Statuta Mahkamah Internasional Mengenai Perjanjian Internasional) perjanjian Internasional baik yang bersifat bilateral, regional maupun multilateral dijadikan sebagai dasar hukum dalam penyelesaian sengketa di Mahkamah Internasional. apabila pelaku penyadapan adalah pihak swasta yang diperintah oleh suatu badan negara ataupun mempunyai kontrak dalam melakukan penyadapan, kasus ini masih bisa dibawa ke Mahkamah Internasional.

<sup>77</sup>*Ibid.*

<sup>78</sup>Dewi Safitri, “*Sikap SBY Soal Australia ‘Mengecewakan’*” diakses dalam [http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2013/11/131127\\_australiadisappointing](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2013/11/131127_australiadisappointing) pada 12 September 2017 pukul 20.22 WIB

<sup>79</sup>*Ibid.*

Internasional, dan jelas melanggar rasa persahabatan antara kedua negara...”,<sup>80</sup>

Menurut Marty apabila Australia melakukan kerjasama di bidang IT bersama Indonesia, maka kedua negara tersebut dapat mengurangi ancaman terorisme maupun jejaring *People Smuggling*,<sup>81</sup>

“Berkat Kersajama seperti inilah kita misalnya berhasil membongkar ancaman terorisme, membongkar jejaring people Smuggling”,<sup>82</sup>

Selanjutnya langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia yaitu Pembentukan resolusi PBB untuk mendesak adanya pengawasan Internasional terhadap aktivitas intelijen. Bukan hanya Indonesia saja, bahkan beberapa negara juga mengambil langkah tersebut antara lain negara Brazil dan Jerman.<sup>83</sup> Ketiga negara tersebut melakukan kerjasama dan mendesak agar PBB segera mengeluarkan peraturan tentang aktivitas intelijen.

Pada 26 September 2013 Komite Hak Asasi Manusia PBB secara resmi mengesahkan resolusi atas Hak Privasi.<sup>84</sup> Isi dari resolusi tersebut yaitu bahwa penyadapan yang dilakukan oleh pemerintah dan perusahaan merupakan kegiatan yang melanggar hukum.<sup>85</sup> Wakil Ketua Komisi I DPR, TB. Hasanuddin menyatakan jika sudah saatnya di Indonesia mulai memikirkan dibuatnya UU Penyadapan. Ini penting karena banyaknya instansi atau lembaga yang memiliki

---

<sup>80</sup>Dikky Setiawan, *Op. Cit*, Hal. 8

<sup>81</sup>*Ibid.*

<sup>82</sup>*Ibid.*

<sup>83</sup>*Ibid.*

<sup>84</sup>Jurnal Parlemen, *PBB Sahkan Resolusi Hak Privasi, Indonesia Mesti Bikin UU Penyadapan*, diakses dalam <http://www.jurnalparlemen.com/view/6997/pbb-sahkan-resolusi-hak-privasi-indonesia-mesti-bikin-uu-penyadapan.html> pada 11 September 2017 Pukul 23:33 WIB

<sup>85</sup>*Ibid.*

alat penyadap di negeri ini seperti BIN , Polri, Bais TNI, KPK, Lemsaneg, dan sebagainya.<sup>86</sup> TB Hasanuddin dalam pernyataan tertulisnya,

“...Penyadapan sesuai konteks tujuannya adalah bagian dari upaya mendapatkan informasi untuk keperluan penyelidikan dalam upaya penegakan hukum, Jadi semata mata demi penegakan hukum dan bukan untuk kepentingan lain-lain seperti memata-matai lawan politik, mencari atau mendapatkan informasi dari kompetitor bisnis atau melakukan penyadapan untuk tujuan memeras, dan lain-lain...”<sup>87</sup>

TB Hasanuddin juga menambahkan jika alat-alat bantu canggih dan mahal yang dibeli dengan uang rakyat harus benar-benar dipakai oleh aparat sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.<sup>88</sup>

Negara membawa kepentingan mereka masing-masing ke lingkungan eksternal dengan mengusung *power* serta tindakan mereka.<sup>89</sup> Politik internasional ini menggambarkan reaksi dan respon tiap-tiap negara dan bukan hanya sekedar aksi saja. Politik internasional sama halnya dengan politik domestik terdiri dari elemen-elemen kerjasama dan konflik, permintaan dan dukungan, gangguan dan pengaturan. Negara membuat perbedaan antara lawan dan kawan.<sup>90</sup>

Penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap beberapa Pemerintah Indonesia menyebabkan konflik *eksternal* diluar keterlibatan Pemerintah. Konflik tersebut dilakukan oleh para *non-state actor* antara Indonesia dengan Australia

---

<sup>86</sup> Laurencius Simanjuntak, *PBB Sahkan Resolusi Hak atas Privasi, RI Perlu UU Penyadapan*. Diakses dalam <https://www.merdeka.com/peristiwa/pbb-sahkan-resolusi-hak-atas-privasi-ri-perlu-uu-penyadapan.html> pada 11 September 2017 Pukul 23.40 WIB

<sup>87</sup> Ibid.

<sup>88</sup> Ibid.

<sup>89</sup> Anak Agung Banyu Perwita, Yanyan Mochamad Yani, 2006. "*Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*" Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA hal 39

<sup>90</sup> Ibid. Hal. 40

yang berupa peretasan antar *website* kedua negara tersebut. Konflik dunia maya yang dialami oleh Australia dengan indonesia akan dibahas pada bab selanjutnya.

